BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025

Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital

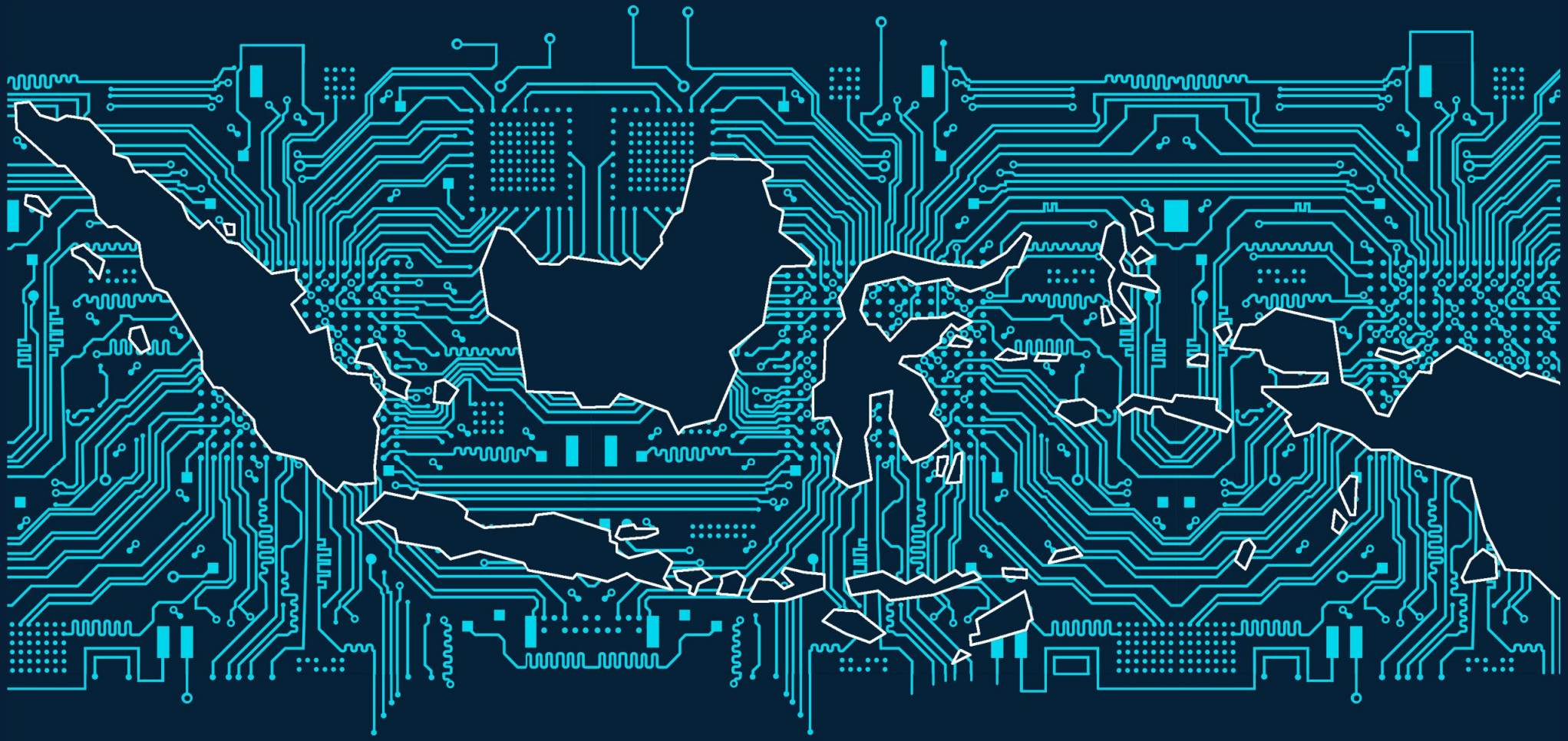

Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Digital 2025

OPEN API | BI-FAST | QRIS | IPT | BI-RTGS | DATA HUB | *PAYMENT* ID | SANDBOX 2.0 | ELEKTRONIFIKASI

Membawa **91,3 juta penduduk *unbanked* dan 62,9 juta UMKM** ke dalam ekonomi dan keuangan formal secara *sustainable* melalui pemanfaatan digitalisasi

Sektor Finansial

Sektor Riil

Rasionalitas *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025

Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 hadir sebagai solusi untuk menjawab tantangan di era digital

Tantangan Kebijakan

1 Digitalisasi ekonomi dan keuangan meningkat pesat

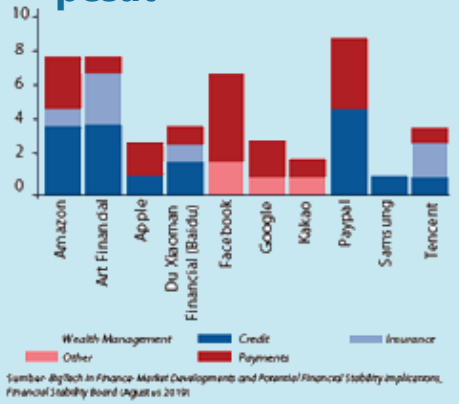

Jenis Jasa Keuangan Big Tech

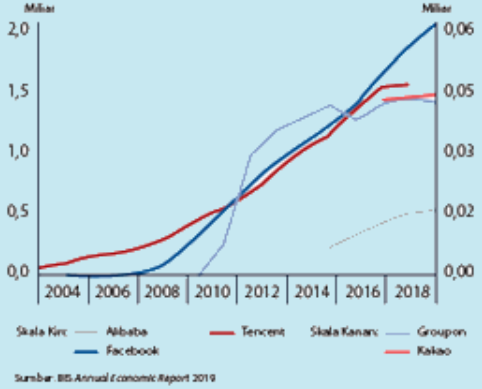

Jumlah Pengguna Aktif Big Tech

2 Teknologi digital mengubah perilaku manusia, baik sebagai konsumen maupun tenaga kerja

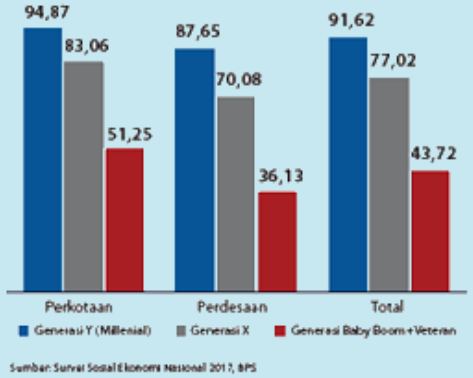

Persentase Pengguna Telepon Seluler (%)

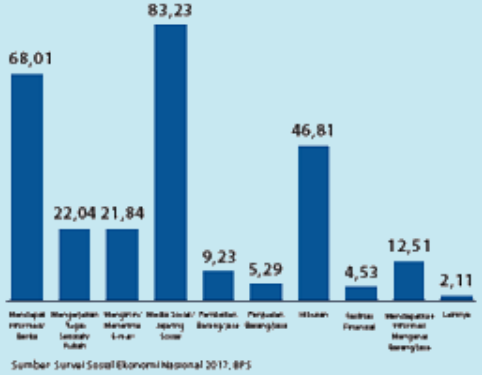

Tujuan Penggunaan Akses Internet Generasi Milenial Indonesia (%)

Lesson Learned

SINERGI

TRANSFORMASI

INOVASI

RESPON

Visi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025

1. SPI 2025 mendukung **integrasi ekonomi-keuangan digital nasional** sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses pengedaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan, serta mendorong inklusi keuangan

2. SPI 2025 mendukung **digitalisasi perbankan** sebagai lembaga utama dalam ekonomi keuangan digital melalui *open banking* maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan

3. SPI 2025 menjamin ***interlink* antara *fintech* dengan perbankan** untuk menghindari risiko *shadow-banking* melalui pengaturan teknologi digital (seperti API), kerja sama bisnis, maupun kepemilikan perusahaan

4. SPI 2025 menjamin **keseimbangan antara inovasi dengan *consumers protection,* integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat** melalui penerapan KYC& AML-CFT, kewajiban keterbukaan data/informasi /bisnis publik, dan penerapan *regtech* dan *suptech* dalam kewajiban pelaporan, regulasi, dan pengawasan

5. SPI 2025 menjamin **kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antar negara** melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dan kerja sama penyelenggara asing dengan domestik, dengan memperhatikan prinsip resiprokalitas

Konfigurasi Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia

SPI 2025 mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan.

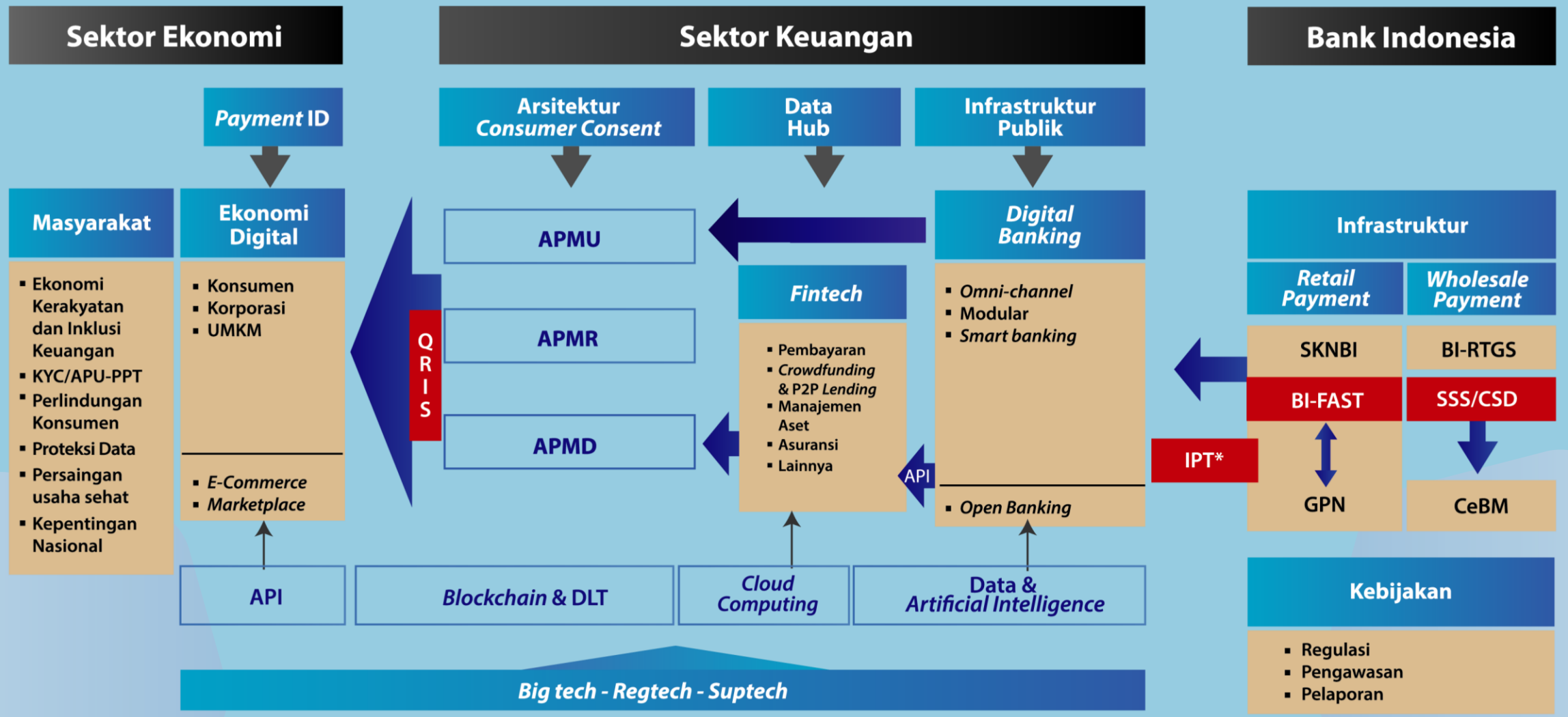

*Interface Pembayaran Terintegrasi

Blueprint SPI 2025 membutuhkan dukungan dan kolaborasi dengan Industri

5 Inisiatif
Blueprint Sistem Pembayaran 2025

Open Banking
- Standarisasi API Teknis
- Standarisasi API Keamanan
- Standarisasi Kontrak *Open* API
- Standarisasi Data

Sistem Pembayaran Ritel
- *Interface Payment* yang terintegrasi
- Pengembangan *Fast Payment* (BI-FAST)
- Perluasan Layanan GPN
- QRIS

Infrastruktur Pasar Keuangan
- RTGS
- CCP
- CSD
- ETP
- SSS
- TR

Data
- *Payment* ID
- Data Hub
- Integrasi Pelaporan

Pengaturan Perizinan Pengawasan
- Struktur Pengaturan
- Integrasi Perizinan
- Integrasi Pengawasan
- *Sandbox (Regtech,Suptech)*
- *Data Policy*
- Keamanan Siber

INDUSTRIAL APPROACH

REGULATORY APPROACH

COLLABORATIVE APPROACH

Pemerintah | OJK | Perbankan | Fintech | E-commerce

Framework Open API di Indonesia

- ***Inisiatif Open Banking bertujuan untuk mendorong transformasi digital di perbankan untuk menjamin bank sebagai lembaga utama dalam ekonomi keuangan digital***
- ***Implementasi Open Banking dilakukan melalui standardisasi Open API yang mencakup standar data, teknis, keamanan, & governance***

KONTEKS KEBIJAKAN

Mendukung ekonomi keuangan digital melalui interlink antara bank dengan fintech untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran dan mendorong inklusi keuangan termasuk pembiayaan UMKM

STANDAR *OPEN* API

1 Tujuan *Open* API Standar

1. Meningkatkan efisiensi dalam transaksi dan sistem pembayaran
2. Meningkatkan inovasi dan kompetisi
3. Meningkatkan financial inclusion
4. Mengurangi risiko *Shadow Banking*

2 Guiding Principles

1. Openness
2. Interoperability
3. Independence
4. Flexibility
5. Governance
6. Customer Protection and Consent
7. Novelty

6 Tahapan dan *Timeline*

1. *Consultative Paper*
2. Pembentukan *Working Group* Nasional (Otoritas, Industri, dan Kementerian)
4. Finalisasi
5. Implementasi

4 Implementasi

1. Model Bisnis (Transfer & Payment)
2. Partisipan (PJSP)
3. Timeframe implementasi

5 Usulan Pendekatan Pengaturan (WG5)

1. Mandatory to comply bagi PJSP
2. Rule Based pada standard dan tata kelola Open API: minimum requirement standar data, teknis, keamanan, dan tata kelola.

3 Standar

I Data

1. Semua data dibuka dengan persetujuan konsumen.
2. Ruang lingkup /jenis data: transfer dan payment.
3. Standard content data

II Teknis

1. Protokol komunikasi/ koneksi:HTTPS
2. Tipe arsitektur: REST
3. Format Data: JSON

III Keamanan

1. Otentikasi Nasabah: sesuai rancangan bank/*fintech* (2FA)
2. Otentikasi Website PJSP & Pihak Ketiga
3. Otorisasi: OAuth 2.0
3. Enkripsi: SHA-2/AES-256

IV Tata Kelola

1. Standard Governing Body
2. Standarisasi Kontrak
3. Consumer Protection - Consumer Consent & Dispute Resolution

Konfigurasi Sistem Pembayaran Ritel

- *Infrastruktur sistem pembayaran ritel diarahkan pada modernisasi infrastruktur yang lebih efisien dan aman dengan memanfaatkan teknologi terkini*
- *Dukungan infrastruktur tersebut diharapkan mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan metode pembayaran digital yang serba mobile, cepat, aman dan murah*

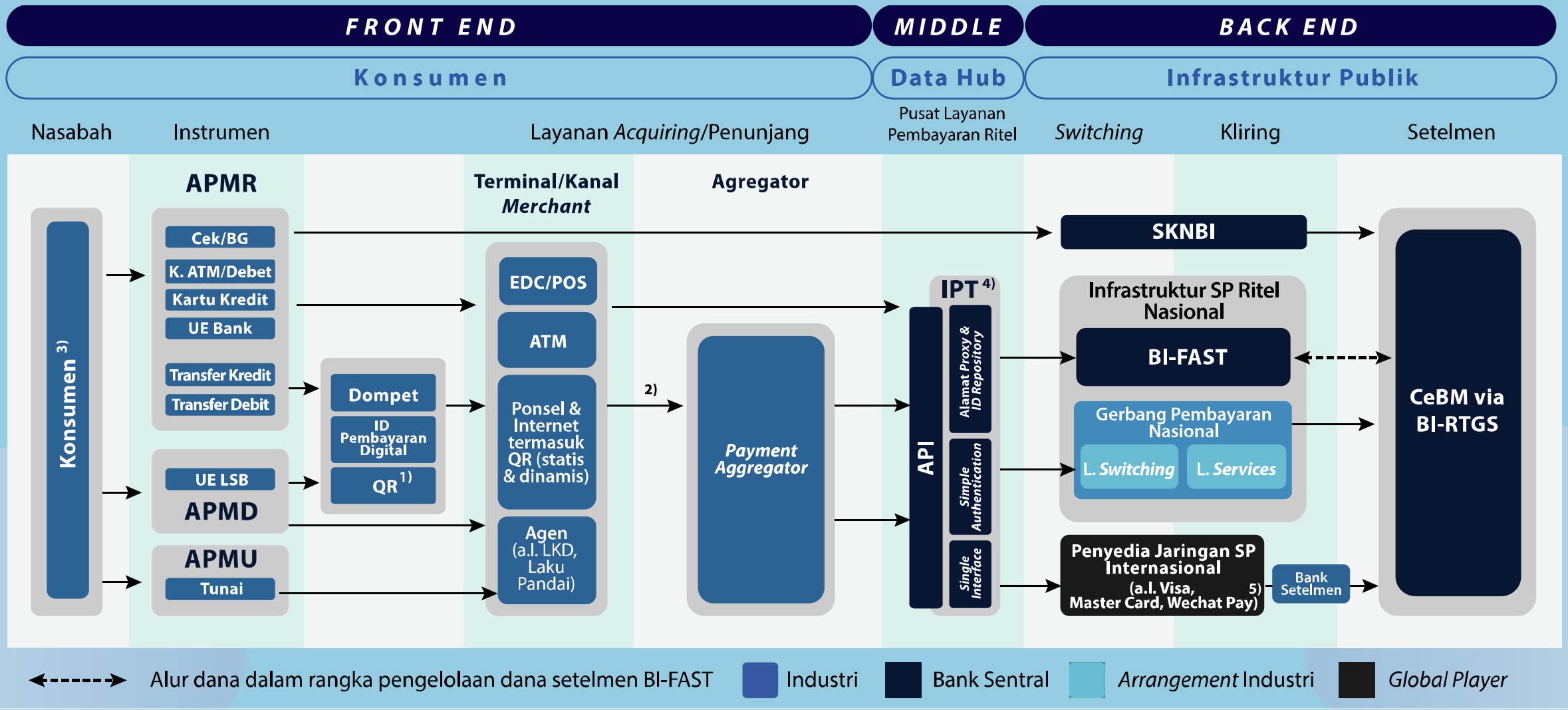

Konfigurasi Data Hub

Pengembangan infrastruktur publik untuk menjamin keterbukaan terhadap akses data dan informasi dengan tetap memperhatikan proteksi data pribadi konsumen dan prinsip persaingan usaha yang sehat

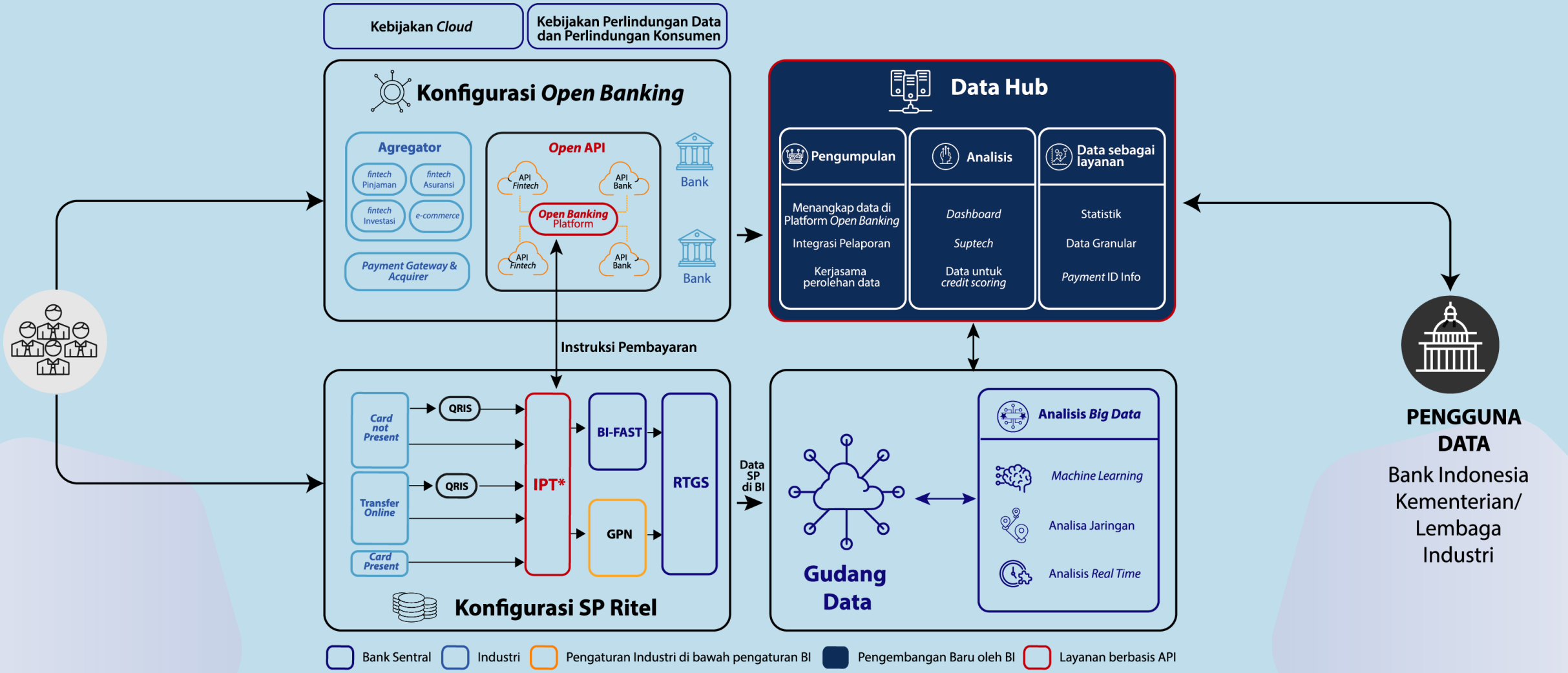

**Interface pembayaran terintegrasi*

Konfigurasi Pengaturan, Perizinan, Pengawasan & Pelaporan

Pengaturan sistem pembayaran ke depan juga akan mencakup penguatan entry policy dan integrasi perizinan yang lebih sederhana tanpa mengurangi aspek kehati-hatian. Regulasi dan ketentuan sistem pembayaran akan ditata secara lebih terstruktur, proporsional, forward looking, serta agile

Cakupan:
Instrumen, Infrastruktur, Mekanisme, Lembaga, Lintas Batas

Prinsip Panduan:
Asas Legalitas, Manfaat, Efisiensi, Keterbukaan, Akuntabilitas, Transparansi, Kepentingan Nasional

DESIGNATION
(Entry Policy)
Penetapan

PERIZINAN
(Entry Policy)
Perizinan, Persetujuan, Pendaftaran
Pelaporan, Penunjukkan

PRAKTIK BISNIS YANG SEHAT
Produk, Kejelasan Kontrak, Harga yang wajar
Perilaku Pasar, Pelaporan & Transparansi
Manajemen Risiko, Perlindungan Data Konsumen, APU/PPT

RUANG LINGKUP SP
Instrumen, Mekanisme, Lembaga, Infrastruktur, Lintas Batas

Reporting, Pengawasan, Aksi Pengawasan
(koreksi dan sanksi administratif)

EXIT POLICY

***Sandbox*, *Regtech* dan *Suptech*, Keamanan Siber**

Infrastruktur Pelaporan dan Informasi

Koordinasi dengan Otoritas Lain (Domestik dan Lintas Batas)

Roadmap dan *Timetable Blueprint* SPI 2025

Quick Wins

	Deliverables Utama	2019	2020	2021-2025
WG 1	***OPEN BANKING***	***Consultative paper*** →	**Implementasi *Open* API di Ekosistem Pembayaran Digital** →	**Perluasan Implementasi *Open* API**
WG 2	**SISTEM PEMBAYARAN RITEL**	**Desain Konseptual BI-FAST** → **QRIS MPM** →	**Pengembangan BI-FAST** → **Desain Konseptual IPT** → **QRIS CPM**	**BI-FAST** (Gel I Transfer kredit 2021) → **Perluasan BI-FAST** **Pengembangan IPT** (2021), ***Live*** (2025) **Perluasan layanan GPN**
WG 3	**INFRASTRUKTUR PASAR KEUANGAN**	**Desain Konseptual BI-RTGS** → **Desain Konseptual BI-ETP** → **Pengembangan Market Operator** (2019), **Pengaturan CCP** (2020)	**Koneksi KPEI-BI SSSS** **Live LSM BI-RTGS Eksisting** → **Desain Konseptual BI-SSSS** →	**BI-RTGS** (*live* 2023) **BI-ETP** (*Live* 2022) **BI-SSSS** (*Live* 2024)
WG 4	**DATA**	**Desain Konseptual Data Hub & *Payment* ID** → **BI-Antasena** →	**Ujicoba Data Hub & *Payment* ID** → **Perluasan BI-Antasena** →	**Pengembangan dan Perluasan Cakupan Data Hub & *Payment* ID** (termasuk perluasan integrasi pelaporan)
WG 5	**PERATURAN, PERIZINAN, PENGAWASAN**	**Desain Struktur Pengaturan** a.l. *Cloud Policy, Entry Policy,* dan Pengawasan →	**PBI SP** (PBI Payung Sistem Pembayaran) →	**Ketentuan Pelaksanaan**

Dukungan Industri SP Nasional Terhadap BSPI 2025

Implementasi BSPI 2025 memerlukan dukungan dan kolaborasi intensif stakeholder terkait…

1. **Sinergi dan kolaborasi yang efektif** seluruh pelaku industri untuk mewujudkan deliverables BSPI 2025 secara efisien dengan kompleksitas yang minimal
2. **Komitmen yang kuat** seluruh pelaku industri untuk mendukung implementasi BSPI 2025 khususnya implementasi standardisasi Open API, BI-FAST dan Interface Pembayaran Terintegrasi
3. **Melakukan transformasi digital** secara *end to end* sehingga mampu memiliki daya saing yang tinggi
4. **Melakukan kerjasama dan kolaborasi produktif** antara perbankan dan *fintech* yang resiprokal, termasuk pertukaran data transaksi pembayaran berbasis *customer consent*.
5. **Melakukan perencanaan investasi** kedepan sesuai rencana pengembangan infrastruktur di Bank Indonesia
6. **Mendukung implementasi standar API** melalui proses harmonisasi dengan seluruh industri perbankan

BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

Terima kasih